

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasar pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kalimat pemberdayaan merupakan asal kata dari “daya” dengan maksud kemauan dalam bertindak atau dorongan untuk mau dalam suatu hal, dengan kemudian diiringi kata “ber-daya” didalamnya mempunyai arti berkemampuan maupun berkekuatan, pada kata pemberdayaan didasari dari suku kata “pember-daya-an dimana berarti juga tahapan maupun proses atau upaya guna memberdayakan.¹ Pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian beserta proses semangat yang diberikan untuk seorang yang keterbatasan dalam akses terhadap daya pembangunannya berkehidupan dalam keseharian. Pemberdayaan masyarakat adalah aktivitas yang upaya peningkatan kualitas masyarakat. pada upaya pemberdayaan berfokuskan kepada apa yang dibutuhkan, keunikan serta potensi dalam masyarakat tersebut. Sementara itu dari sudut pandang yang lain mendefinisikan pemberdayaan merupakan usaha guna memberdayakan individu dan memberikan tanggung jawab individu kesadaran dalam peningkatan diri guna kebaikan bersama atau organisasi. pemberdayaan dilakukan pada seluruh elemen tidak terkecuali baik yang tidak berdaya maupun mampu memiliki daya. Parameter dari tingkat keberhasilan pemberdayaan dapat dianalisa dengan meninjau pada yang diberdayakan dapat dikatakan mampu berdaya dan ikut berkontribusi secara efektif pada suatu program dengan maksud adalah peningkatan kapasitas dan

¹ KBBI Online, diakses pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 09.04 WIB.
<https://kbbi.web.id/daya>.

kemandirian atau pengetahuan berserta kemampuan untuk menanggungnya.²

Berdasarkan penuturan berbagai ahli terkait maksud “pemberdayaan” dapat diuraikan:

- a. Menurut Osmani, pemberdayaan merupakan suatu keadaan dimana orang yang tidak berdaya mampu menciptakan suatu kondisi sedemikian rupa hingga mereka mampu memberikan masukan dan mereka mampu bisa melibatkan dirinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan maupun organisasi.³
- b. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan suatu usaha untuk mengangkat keahlian dalam perwujudan dapat mandiri dan terlepas dari keterbatasan kemiskinan serta ketidak mampuan dalam melakukan suatu hal.⁴
- c. Menurut Robert Chambers, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat suatu ide yang digunakan pembangunan ekonomi yang meringkas berbagai nilai sosial. Ide ini merupakan contoh pembangunan yang berbeda, dengan memiliki sifat *people centered* (berintikan pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan). Ide ini menyangkut aspek lebih luas tidak sebatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan atau pencegahan kemiskinan berkelanjutan (*safety net*).⁵
- d. Menurut Widjaja, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan upaya yang mampu dilakukan desa bertujuan mencapai suatu

² Wedi Trio Putra dan Ismaniar, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank

Sampah Di Bank Sampah” e- ISSN 2721-0480” *Journal of Community Empowerment*, Vol. 01 No 02 (2020): 71.

³ Andi Haris, “Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Manfaat Media” *Jupiter*, Vol. 13 No. 2 (2014), 51.

⁴ Di Pratiwi Kurniawati, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 9 (2013), 10-11

⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar:De La Macca, 2018), 10.

yang diharapkan. Perolehan yang diusahakan lewat pengembangan kreatifitas, inisiasi maupun motifasi guna ekonomi yang maju dan dapat mampu berdampak pada kesjahteraan desa.⁶

- e. Menurut Djohani memaparkan, pola mendasar dari pemberdayaan masyarakat mengintruksikan perlunya *power* dankecondongan pada kelompok yang tidak berdaya. Oleh sebab itu pemberdayaan adalah sebuah metode untuk memberikan daya ataupun kekuasaan (*power*) terhadap pihak yang lemah (*powerless*), dan memotong kekuasaan (*disepowered*) kepada pihak dengan kuasa lebihguna seterusnya mencapai keseimbangan.⁷

Dari berbagai sumber diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pemberdayaan merupakan proses yang terprogram dengan teratur pada suatu daerah-daerah tertentu maupun wilayah tertentu yang memiliki sumber daya alam dan potensi namun belum bisa menggunakannya. Terwujudnya suatu komunitas atau organisasi bertujuan untuk membuatterwujudnya kegiatan yang meiliki kejelasan dalam tujuan yang terprogram serta keharusan untuk tercapai, dengan demikian setiap adanya pemberdayaan masyarakat perlu adanya strategi kerja tertentu, yang bertujuan menjadikan strategi yang telah terprogram bisa mencapai keberhasilan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pengertian lain adalah, masyarakat mampu berpartisipasi dan adanya keterlibatan langsung dalam sebuah keputusan dan kontrol dalam ber koordinasaidalam upaya bersama terkait hal yang membangun, akan tetapi masyarakat mampu berperan secara individu maupun dari pengaruh eksternal individu agar mampu membangun desa agar lebih baik.⁸

⁶ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa" *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 1 (2020), 137-138.

⁷ Yamulia Hulu, dkk, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2018), 149.

⁸ Fitri Arifa, dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten

Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebianto, tahanan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha guna menyadarkan untuk memfasilitasi perencanaan.⁹ Menurut Suparjan jurnal yang disusun oleh Hadhan Bachtiar didapati pernyataan partisipasi masyarakat atau peran masyarakat di artikan dari beberapa sebagai berikut:

- a. Dengan ikut serta dalaam kegiatan maka memicu rasa tanggung jawab dan *handarbeni* (*sense of belonging*) dalam terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Dengan ikutnya partisipasi masayarkat dapat meningkatkan potensi terhadap masyarakat beserta memberikan posisi nilai tawar dengan tujuan mencapai keseimbangan antara pemilik modal maupun dengan pemerintah.
- c. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat mampuberpengaruh pada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak berwenan dalam hal ini pemerintah, sehingga berbagai aspek dapat saling bersinergi.¹⁰

Diteruskan pengertian pemberdayaan masyarakat ada beberapa yang di tuliskan oleh para ahli, menurut Sumardjo dari jurnal yang ditulis oleh Kiki endah menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dikatak sebagai pengembangan dengan proses serta adanya kesempatan, didorong serta kemauan, dan terjangkaunya akses sumber daya bagi masyarakat, sehingga tercapainya kualitas maupun kapasitas yang meningkat dalam kehidupan.¹¹

Menurut Amrullah Ahmad, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat tindakan nyata dalam sistem

Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang)” *Nusantara Journal Of Economics* , Vol. 1, No. 1 (2019), 20.

⁹ Wegi Trio Putra, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah” *Jambura Journal of Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2 (2020), 74.

¹⁰ Wegi Trio Putra, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah” *Jambura Journal of Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2 (2020), 130.

¹¹ Kiki Endah, “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa” *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. (2020), 137.

dengan lewat alternative model solusi permasalahan perorangan terkait sosial, ekonomi, maupun lingkungan dalam sudut pandang Islam. Iman Mansur Burkan mempunyai pandangan terkait pemberdayaan atau pengembangan masyarakat dalam usaha keterbangkitan dari potensi yang ada pada hal yang baik didalam berbagai macam aspek.¹²

Dari proses pengembang yang didapati, didasari dalam tersebut suatu hambatan yang didalamnya terkait ketidak berdayaan masyarakat. Menurut Ife, terdapat berbagai macam kekuatan yang muncul dari masyarakat yang dapat menunjang pemberdayaan dalam masyarakat, diantaranya:

- a. Kemampuan masyarakat dalam pengambilan suatu putusan memberikan pilihan dari diri sendiri, yang nantinya akan memberikan suatu tujuan untuk bisa menjalankan kehidupandengan ebih bersahaja, dari hal tersebut peran dari upaya pengembangan dapat memberikan kesempatan baik bagi masyarakat.
- b. Kuasa untuk memberikan suati kebebasan dalam memberikan pernyataan. Dimana dalam proses pengembangan terkait dengan berbagai kemampuan masyarakat dalam perwujudannya.
- c. Kekuatan terkait penentuan kebutuhan hal yang perlu dipersiapkan kedepan serta apa yang dibutuhkan kedepan dalam pemberdayaan masyarakat. Perlunya arahan tentang bagaimana mempersiapkan dan apa saja yang dibutuhkan dan sudah dirumuskan kepada pendamping.
- d. Kekuatan kelembagaan. dengan upaya mencapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dalam semua aspek dalam kehidupan tersebut , dengan hal tersebut dapat memicu peningkatan sehingga menguatkan kelembagaan guna melancarkan proses pemberdayaan masyarakat.

¹² Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2001), 45

- e. Kekuatan dalam sumber daya ekonomi karena fokus pengembangan tertuju pada perekonomian masyarakat terutama didesa agar mampu lebih berkualitas dari yang sebelumnya.¹³

2. Tujuan Pemeberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat dan kelompok dalam hal ini keluarg yang masih berada pada garis kemiskinan agar berani menyampaikan saran dan gagasan, serta berani penentuan opsi kebaikan terkait konsep maapun metode, pemilihan tindakan yang dinilai tepat tidak sebatas pada keluaraga dan pribaditetapi berdampak pada masyarakat luas.¹⁴ Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dipahami berperan dalam perwujudan impian dan menjadikan masyarakat yang lebih baik untuk kehidupan kedepannya, terlepas dari itu semua sebagai penyuluh harus memiliki jiwa untuk pembaruan menjadikan masyarakat yang lebih baik kedepannya, dan memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mendorong kesadaran masyarakat. Penyuluh dalam misi pemberdayaan menyadarkan masyarakat atas keberdaannya. Keberadaan disini diartikan adanya posisi masyarakat sebagai anggota keluarga dan pribadi sebagai masyarakat, keberdaannya disini meliputi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan fisik ataupun teknis, dan politik.
- b. Adanya pengenalan dan memberitahukan adanya permasalahan. Memberikan informasi mengenai keadaan yang tidak diinginkan masyarakat terkait dengan kondisi sumber daya dan lingkungan. Sumber daya yang dimaksud disini merupakan sumber daya manusia, budaya potensi alam, sarana-prasarana serta kondisi politik. Dalam kontek ini penyuluh juga harus

¹³ Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 47-48 .

¹⁴ Andi Haris, “Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfatan Media” *Jupiter* , Vol. XIII No. 2 (2014), 51

- bisa mengecek apakah faktor tersebut akibat kesalahan internal ataupun eksternal.
- c. Mampu bertindak dalam mencari jalan keluar permasalahan, penyuluh di sarankan untuk bisa membantu mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi masyarakat, dengan cara menganalisa akar permasalahan, menyusun solusi untuk bisa memilih dan mencari jalan keluar yang terbaik.
 - d. Memberikan suatu keyakinan akan terjadinya perubahan, masyarakat harus bersiap akan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi di lingkungan internal maupun eksternal yang selalu akan mengalami perubahan. Oleh karena itu penyuluh harus menunjukkan perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam lingkungannya, baik dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan organisasi.
 - e. Menguji dan memberikan suatu contoh menegnai perubahan terencana, melakukan pengujian beserta memberikan contoh merupakan bagian dari perubahan terencana yang sudah di atur. Sebuah penemuan baru tidak selalu nyaman baik dalam segi teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan politik ataupun kebijakan untuk penerapan kepada masyarakat. Oleh karena itu uji coba juga penting agar diperoleh tentang gambaran beragam alternatif yang paling menguntungkan dan pengorbanan yang paling rendah.
 - f. Melaksanakan serta mempublikasikan informasi, informasi yang didapatkan serta mendapatkan pengumuman yang bersumber dari luar dan dalam lingkungan masyarakat. Informasi yang bisa didapat dari luar lingkungan masyarakat seperti peraturan, kebijakan, pelaku usaha, kebijakan dan lain sebgainya. Sedangkan infromasi yang didapat dari dalam yang diperoleh, kearifan lokal, nilai adat, kebiasaan serta pengalaman.
 - g. Menguatkan isi-isi yang di rasakan masyarakat, yang dimaksudkan menguatkan isi-isi yang di rasakan masyarakat memberikan untuk bisa menetapkan pilihan dan berpendapat. Kesempatan ini mencakup

ketersediaan informasi dan berpendapat, penguatan kapasitas lokal, bertanggung-gugat, kegiatan pembangunan.¹⁵

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Dari pemaparan ahli, yang bernama Dhamotaran beliau mengungkapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilalui dengan 7D yang dapat dilaksanakan seperti pemberian apresiasi terhadap prestasi dan potensi pada masyarakat maupun nilai-nilai yang autentik yang dimiliki masyarakat tersebut. serta dorongan dalam memahami berbagai potensi dari bermacam sumber daya yang dimiliki serta mungukur atau mengkaji kemampuan masyarakat. Pendekatan 7D dijelaskan diantaranya:

- a. *Developing relation* (Mengembangkan hubungan), pada tingkatan ini akanmulai munculnya rasa kepercayaan dalam masyarakat, serta pad kelompok masyarakat mulai berhubungan dengan rasa percaya dari puhak luar masyarakay seperti, pejabat pemerintah, maupun narasumber luar. Dalam tercapainya proses tersebut memerlukan tahapan waktu yang lama guna bisa saling memahami maupun ngenali ataupun saling bisa menerima.
- b. *Discovering capacities* (Menemukan kapasitas), dari proses penemuan kapasitas masyarakat perlu mengenali serta menemukan kesadaran terhadap keahlian khusus yang dimiliki yang terdahulu juga paham serta mengathui permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat, dimana dapat dilihat kemampuan masyarakat apakah bisa menyelesaikan dan memecahkan masalah, serta bagaimana proses yang digunakan. Masyarakat bisa mencoba memahami dan menemukan ukuran kemampuan masyarakat, beserta sumber daya yang mampu digunakan.
- c. *Dreaming of community* (Membangun cita-cita masyarakat), pada tahapan masyarakat harus

¹⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarkat*, 170-171

menyatakan cita-cita masyarakat. Cita-cita merupakan suatu gambaran yang kreatif tentang masa depan positif. Setelah masyarakat menyatakan cita-cita, kemudian masyarakat bisa mengembangkannya menjadi visi. Visi diterjemahkan sebuah citacita yang digambarkan di masa depan yang menarik dan jelas, yang mampu menumbuhkan dan menjadikan motivasi yang kuat untuk bisa bertindak untuk mencapainya.

- d. *Directions of community actions* (Arah tindakan masyarakat), Masyarakat pada fase tahapan ini membuktikan maksud yang jelas untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Tujuan sebaiknya menerangkan dengan jelas dan sudah disetujui masyarakat.
- e. *Designing community actions* (Merancang tindakan masyarakat), Proses selanjutnya ini masyarakat merancang dan merumuskan tindakan dengan menerjemahkan visi, tujuan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana dan terstruktur yang jelas dan masuk akal. Selama proses pembuatan rencana, masyarakat harus bisa mencoba untuk menggunakan sumber daya internal dan disamping itu juga menggunakan sumber daya eksternal, misal yang berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah.
- f. *Delivering planned activities* (Melaksanakan kegiatan), dimana masyarakat bisa melaksanakan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini pengambilan dari internal maupun eksternal harus diatur sehingga kegiatan yang sudah tersusun bisa terlaksana dengan sukses. Pengawasan harus ekstra ketat penting untuk meyakinkan bahwa kegiatan dilaksanakan dan perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat.
- g. *Documenting outputs, outcomes and learning* (Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari), dalam tahapan masyarakat ini masyarakat harus memiliki pemikiran terhadap proses perjalanan dan hasil yang telah dicapai. Pemikiran ini dilakukan oleh

masyarakat beserta semua pihak yang telah terlibat pihak dalam maupun dari pihak luar. Dokumentasi merupakan penilaian proyek dan rencana aksi untuk evaluasi keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dokumentasi terdiri dari evaluasi dari berbagai pembelajaran atas yang dialami dan menyimpulkan dari apa yang diketahui dan penalaman yang dikaji dari kejadian sebelumnya.¹⁶

4. Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat

Hal-hal yang menjadi suatu yang utama guna mengangkat kualitas masyarakat yang sudah terperangkap dalam masalah kehidupan seperti kemiskinan dan keterbelakangan, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan sebagai model untuk melepaskan segala keterbatasan seperti halnya masyarakat yang terbelakang ataupun kemiskinan. Maka demikian penting untuk suatu tujuan dalam aspek ekonomi yang lancar, maka dari hal tersebut aspirasi masyarakat terekam dan dirumuskan oleh kebijakan publik untuk bisa mencapai tujuan masyarakat yang dikehendaki.¹⁷ Oleh sebab itu guna didapat apa yang dicita-citakan dari semua elemen baik pemerintahan ataupun masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat, perlu adanya langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai langkah-langkah pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Memajukan keahlian masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan ilmu-ilmu baru.
- b. Memberikan ambisi terhadap masyarakat yang akan diberdayakan

¹⁶ Budhi Pamungkas Gautama, dkk, "Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 4 (2020), 361362

¹⁷ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah CIVI*, Vol. 1 No.2 (2011)
: 89

- c. Memberikan pembinaan kepada masyarakat yang akan diberdayakan melalui penyuluhan dan sosialisasi
- d. Membuatkan peluang untuk memberikan jalan dalam penyaluran produksi mandiri kepada masyarakat yang akan diberdayakan.¹⁸

5. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu hal utama bahkan terbilang kunci dalam keberhasilan memberdayakan masyarakat salah satunya adalah dengan menstimulasi bermacam kagiatan pada lingkungan masyarakat.¹⁹ Upaya memberdayakan masyarakat didalamnya terdapat manfaat alternatif dimana dapat menjadi sarana mewujudkan pengembangan literatur serta pemikiran meskipun pada yang terjadi belum dapat dikatakan maksimal pengaruhnya.²⁰ Dengan demikian penentuan langkah yang strategis merupakan suatu yang tidak bisa terlepas guna tercapai cita-cita dalam pemberdayaan sesuai apa yang diharapkan semua pihak, beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran, pada langkah pertama dengan berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat lewat berbagai cara seperti sosialisasi bahwa masyarakat sendiri layak mendapat situasi atau keadaan yang bisa lebih baik lagi.
- b. Tahap pengkapasitasan, atau memampukan, tahap tersebut dimanamenginformasikan pada masyarakat terkait informasi terkait seperti sistem, organisasi, pengetahuan maupun fasilitas.
- c. Tahap pendayaan, dari tahapan sebelumnya yang telah diketahui masyarakat, selanjutnya diberi kesempatan untuk mempraktikan dari apa yang didapat sebelumnya, dengan pendayaan dapat

¹⁸ Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 300.

¹⁹ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 49.

²⁰ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah CIVI*, Vol. 1 No.2 (2011) : 88.

menimbulkan perkembangan pada masyarakat seperti keterampilan.²¹

6. Teknik, Metode dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat familiar dengan suatu yang perlu dipraktikkan serta diwarnai dengan teori yang terkait pada permasalahan. Apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan pemberdayaan perlu dilakukan penyesuaian dalam menerapkan praktek yang sesuai bagi masyarakat. Praktek yang akan aplikasikan pada masyarakat memberi hal yang lebih daripada sebatas penjelasan atau teori dengan harapan dapat bisa terpahami bagi masyarakat yang terlibat.²²

Berikut tersampainya suatu pemberdayaan perlu memperhatikan beberapa tehnik pendekatan pada lapangan, seperti:

- a. *Participatory Rural Appraisal* (PRA), teknik ini adalah menggunakan masyarakat untuk melakukan metode-metode pengembangan masyarakat menjadikan masyarakat sebagai metode. *Participatory Rural Appraisal* merupakan tahap seterusnya dari *Rapid Rural Appraisal*.
- b. *Achievment Motivation Training* (AMT), ialah pelatihan memberikan tekad yang memperlihatkan tanga hal utama, yaitu *achievment, power, psikomotorik*, yang mnegikuti prinsipprinsip dalam standart pendidikan dewasa.
- c. *Action-Research* sebuah teknik yang diperuntukkan untuk membangun kesadaran mengenai berbagai macam yang dihadapi masyarakat dimana terkait dengan potensi yang ada .
- d. *Participatory Action Research* ialah salah satu cara yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan

²¹ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarkat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), 31

²² Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 300.

menyadarkan terkait tolak ukur masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki mulai potensi maupun permasalahan berguna dalam kegiatan masyarakat yang kedepannya dilakukan, agar masyarakat berminat untuk ikutpartisipasi dalam pelaksanaan.

- e. *Why tree dan problem tree* teknik ialah diperuntukkan untuk perancangan dan evaluasi yang menggunkan struktur analisis yang berbentuk mirip pohon. Teknik terbentuk antara lain *problem tree, solution tree*, dan sebagainya.²³

Ada berbagai metode selain pada yang ada diatas, adapun metode pemberdayaan masyarakat partisipatif, seperti:

- a. Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), metode ini bisa di anggap cepat untuk mendapatkan informasi yang akurat, dan metode ini sering diprakteksn diluar negeri dengan melibatkan masyarakat dengan skala yang sedikit. tetapi maksud dari tujuan demikian guna membangun pemahaman terhadap tingkat lokal diiringi pula pengetahuan yang ilmiah.
- b. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), hasil dari metode RRA yang sudah disempurnakan. Metode ini bisa melibatkan dengan banyak orang dalam yang berkepentingan dengan difasiltasinya dari orang luar di peruntukkan menjadi narasumber atau fasilitator dibandingkan sebagai pemandu atau guru yang menggurui.
- c. Metode *Fokus Group Discussion* (FDG), metode ini digunakan untuk diskusi dengan kelompok secara terarah. FGD merupakan interaksi ataupun berbincang-bincang dengan individu-individu sekitar 10-30 orang dengan orang yang tidak saling mengenal dan dipandu oleh seorang moderator yang bertujuan untuk mendiskusikan pengalaman dan pemahaman tentang sesuatu kegiatan atau program yang dicermati dan diikutinya.

²³ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press,2013),70.

- d. Metode *Participatory Learning and Action* (PLA), terkait pembelajaran maupun praktek secara partisipatif metode ini dibentuk baru dari pemberdayaan masyarakat yang dulunya dikenal dengan “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja. Secara singkat PLA merupakan proses belajar yang bertopik menjelaskan tentang metode pemberdayaan masyarakat. Yang akan secepatnya diikuti dengan kegiatan yang riil atau aksi yang searah dengan materi pemberdayaan masyarakat.
- e. Metode SL atau Sekolah Lapang (Farmers Field School) salah satu cara pemberdayaan masyarakat, SL/FFs merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang alternatif dan pemilihan caracara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.
- f. Pelatihan Partisipatif Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diawali serta dengan “*scopping*” atau penelusuran tentang program pendidikan yang diperlukan dan analisis kebutuhan atau “*need assesment*”. Untuk kemudian berdasarkan analisis kebutuhannya, disusunlah program atau acara pemberdayaan masyarakat yang dalam pendidikan formal (sekolah) disebut dengan silabus dan kurikulum, dan perumusan modul/lembar persiapan fasilitator pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Dengan pola upaya pemberdayaan yang telah terencana dimana telah ditentukannya strategi maka memunculkan pemahaman juga pengetahuan pada diri masyarakat terkait bermacam potensi yang ada seperti halnya perkembangan teknologi maupun bermacam

²⁴ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 71-72

sumber daya lain yang dapat dikategorikan potensi, berbagai tindakan dalam rangka mengupayakan terwujudnya pemberdayaan dapat melewati berbagai cara dari semisal pelatihan, dalam pengelolaan lingkungan sehingga kemampuan dalam manajemen lingkungan pada masyarakat semakin mengalami kemajuan.

Berdasar pendapat Florentina Ratih Wulandari, dengan strategi yang diterapkan dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu berdampak manfaat terkait modal sosial masyarakat yang dibangun dengan strategi guna tercapai pembangunan, dengan sadar secara kolektif untuk hal yang lebih baik sehingga kualitas maupun kuantitas dapat lebih lagi terutama dalam hal jaringan, mewujudkan sifat adaptif maupun inisiatif, inovasi maupun komunikasi terkait dengan aspek lingkungan.²⁵

7. Peran Lembaga dan Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasar yang diutarakan Mulyana, Peran dalam masyarakat guna pengambilan keputusan masyarakat udenganmaksud tercapai apa yang diinginkan bersama. Rasa sadar menimbulkan ketulusan dalam menjalankan berbagai peran diorganisasi.²⁶30 suatu potensi merupakan hal yang diikut sertakan dan tidak dapat dilepaskan dalam dijalankannya program, tidak hanya dukungan dari masyarakat lembaga yang berkaitan juga dibutuhkan perannya, menjadi sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah dalam peran yang dilakukan elemen pemerintahan yang dapat ikut berperan dalalam hal ini adalah aparat terkait dengan bisa mengupayakan dialog serta konsisten dengan misi bersama, mengatur pasar dengan menjamin keamanan maupun kelancaran terutama yang penerapannya memihak masyarakat golongan bawah.

²⁵ Nisita Prabawati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes”, 301.

²⁶ Sutrisno, “Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati”, 70.

- b. Organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, dalam hal ini terdapat lembaga yang dapat berperan juga tetapi diluar dari internal masyarakat setempat seperti yang dijadikan contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- c. Local Community Organization (yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat) dimana yang mempunyai keterlibatan didalam lingkungan tersebut seperti ,KPMD, Karang taruna dan lain sebagainya.
- d. Koperasi berperan mempunyai pengaruh dalam ekonomi masyarakat, karena koperasi dapat dijadikan sarana mencapai cita-cita demokrasi ekonomi serta wataknya yang bersifat ekonomi.
- e. Peran pendamping dibutuhkan untuk serta dalam membantu penyelesaian berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat yang mengalami keterhambatan guna tercapai yang lebih baik.
- f. Bottom-up mempunyai peran dalam mewujudkan gambaran pemberdayaan dalam rencana pembangunan dengan skala nasional.
- g. Dibutuhkannya masyarakat yang mempunyai keahlian dari sektor luar instansi seperti dari swasta.

27

8. Nilai-nilai dan Prinsip-Prinsip dalam Pemerdayaan Masyarakat

Berbagai hambatan dalam upaya membangun masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai normatif yang setidaknya terwujud pada program yang terhambat. terkait munculnya hambatan seperti adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidak terwujudnya harapan bersama dikarenakan munculnya berbagai penyimpangan sehingga tidak dapat menunjang. sebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mengikuti pola pembangunan yang dilakukan, sehingga tidak berjalan sesuai dan tidak

²⁷ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah CIVI*, Vol. 1 No.2 (2011) : 97-98

berdampak baik bagi masyarakat, pemberdayaan didasari berbagai nilai, diantaranya:

- a. Kejujuran (Transparansi), terkait dengan nilai moralitas dimana meupakan suatu hal utama, dengan tanggung jawab yang telah dipercayakkan diiharapkan tidak menyimpang dengan apa yang telah disesuaikan.
- b. Keadilan, dalam hal ini mempunyai maksut nilai yang berkaitan dengan kesamaan dalam berbagai kesempatan bagi masyarakat tanpa ada pembeda dalam suatu kesempatan, maka kesetaraan penting bagi terwujudnya pemberdayaan.
- c. Kepercayaan (Trust), Pada dasarnya kepercayaan merupakan nilai yang dianggap kebenaran bagi masyarakat sehingga penting untuk dilibatkan karea menyangkut perspektif masyarakat. dengan rasa saling percaya antar berbagai pihak akan menimbulkan kemudahan dalam pelaksanaan.
- d. Kebersamaan serta tolong menolong, dimana dalam elemen masyarakat sama-sama memunculkan kepedulian secara bersama serta senantiasa tolong menolong.dengan bersatunya semua komponen yang terlibat sehingga menjadi tanggung jawab bersama maka akan memudahkan suatu pencapaian.
- e. Kepedulian, ddari maksud sebuah kepedulian adalah konsisten terhadap komitmen kemasyarkatan dimana dalam hal ini muncul kesadaran yang penuh sebagai masyarakat.dalam berbagai aspek mulai non material maupun material.
- f. Berorientasi, mempunyai pandangan yang lebih maju lagi dimana sadar terkait perkembangan kedepan dalam hal ini perkembangan masyarakat islam, dengan segala sesuatu tindakan mempunyai tujuan yang berorientasi terhadap hal kedepannya.²⁸

Dalam upaya memberdayakan masyarakat didukung hal yang penting didalamnya rasa percaya serta

²⁸ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press,2013), 19-21

tanggung jawab serta kerja sama yang dilakukan dengan komitmen tersebut mampu menunjang pertumbuhan kemajuan pada masyarakat, dan sebagai dampaknya mampu menumbuhkan kesadaran serta solidaritas dalam bermasyarakat.²⁹ Dalam perwujudannya didasari berbagai prinsip, yaitu:

- a. Kebutuhan dan minat, dari upaya yang dilakukan akan lebih baik bila mengerti terhadap kebutuhan yang ada pada masyarakat sehingga mampu menjadi solusi atas apa yang dialami masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi, maka pun menjadi pertimbangan yang penting karena lebih baik bila sesuai karakter masyarakat dalam hal ini terkait pemberdayaan yang bakal dilakukannya,
- b. Organisasi masyarakat bawah, elemen organisasi bawah merupakan akar dari tercapainya pemberdayaan dimana dalam hal ini mulai dari keluarga ataupun kerabat.
- c. Keragaman budaya, aspek yang perlu dipahami salah satu di bilang utama merupakan budaya dimana karakter masyarakat yang bermacam tergantung budaya yang sesuai dengan nilai yang diyakini masyarakat, dengan demikian mampu dilakukan penyesuaian.
- d. Perubahan budaya, segala sesuatu yang berkembang tidak terlepas dengan perubahan, dalam hal ini pemberdayaan yang terjadi dapat merubah pola budaya sebelumnya maka demikian perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi sesuatu mengagetkan bagi masyarakat.
- e. Belajar sambil bekerja, yaitu pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan.
- f. Penggunaan metode yang sesuai, dalam upaya memberdayakan masyarakat dimana dalam hal ini

²⁹ Nisita Prabawati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes”, 303.

berhubungan langsung dengan masyarakat yang didalamnya mempunyai karakter maka penggunaan metode harus dilakukan penyesuaian dengan karakter masyarakat.³⁰

- g. Partisipasi, dengan masyarakat mempunyai bagian dalam pelaksanaan kegiatan secara gotong royong dalam upaya pembangunan masyarakat.
- h. Keadilan dan kesetaraan gender, dalam hal ini memnntingkan aspek keadilan dalam hal gender dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam ikut serta mewujudkan pemberdayaan.
- i. Demokratis, dalam pemberdayaan dilakukan dengan mencapai kemufakatan bersama lewat kegiatan musyawarah dengan menitik beratkan mengupayakan kebaikan bagi masyarakat myang masih mengalami keterbatasan.³¹
- j. Kepemimpinan, dalam kepemimpinan yang dilakukan tidak terbatas pada kepentingan pribadi terutama dalam tujuan pemberdayaan yang dilakukan. demikian pula lebih baik bila memunculkan pemimpin-pemimpin lokal guna dapat memberi pengarahan dalam upaya yang dilakukan.
- k. Spesialis atau orang yang berpengalaman, dalam upaya pengembanga atau pemberdayaan hal terpenting yang pertama adalah edukasi dalam hal ini melibatkan tenaga penyuluh yang sbelumnya telah terbekali kemampuan. D kesiapan bagi penyuluh merupakan hal penting bagi kegiatan yang dilakukan dengan demikian pemilihan tenaga yang terlatih sangat ditekankan.
- l. Segenap keluarga, dimana dalam upaya penyuluhan tetap memperhatikan elemen dalam lingkungan keluarga.

³⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 106-107.

³¹ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 21-22

- m. Kepuasan, dalam pemberdayaan yang dilakukan mampu memberikan kepuasan dari hasil yang didapat, dengan kepuasan yang tercapai, maka keikutsertaan masyarakat akan mengalami peningkatan.³²
- n. Akuntabel dan Transparansi, akses dalam mendapatkan informasi perlu diperhatikan karena dapat mengurangi kecurigaan antar pihak yang terlibat sehingga meminimalisir resiko konflik, serta dalam keterbukaan mampu menjadi fungsi pengawasan dari kegiatan sehingga jauh dari hal yang bersifat menyimpang yang dapat menjadi sebuah hambatan tersendiri.
- o. Keberlanjutan, dalam upaya pengambilan keputusan dampak yang diberikan tidak hanya sekedar menentukan pada waktu tersebut, tetapi mempunyai dampak yang baik bagi kondisi kedepan dalam hal ini dapat dikatakan berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai baik seperti halnya kelestarian lingkungan.³³

9. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Dasar dari terbentuknya suatu kebijakan publik dapat dipengaruhi dari penyusunan maupun perumusan, implementasi atau pelaksanaan, dilakukannya evaluasi sehingga muncul suatu penilaian. dalam melaksanakan hal tersebut perlu dilakukan dengan bijak serta objektif sehingga berdampak pada keadilan, dengan hal tersebut sehingga berdampak baik kedepannya.

Menurut Zulkadi yang dapat dijadikan parameter seperti halnya tindakan, pemecahan masalah yang efektif, tindakan, dan dapat lebih jelas dengan mengamati keadaan sebelum dan sesudah tindakan diambil. Menurut Drabkin kebijakan dimulai dari pengamatan sehingga memunculkan jalan keluar alternatif yang dirasa paling tepat. Menurut

³² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 107-108

³³ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 22.

William N. Dunn berpendapat kebijakan publik m dapat dikatakan pengambilan keputusan yang saling berkesinambungan hasil dari keputusan lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan. kebijakan publik merupakan salah satu yang menjadi faktor penting dalam mencapai cita-cita bersama dengan kepentingan rakyat yang paling utama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan dengan hukum dan jauh dari kepentingan kekuasaan. dari bermacam definisi dapat diartikan “kebijakan publik suatu sistem manajerial yang dapat dijadikan sarana dalam tercapainya tujuan negara.”³⁴

B. Kesejahteraan Ekonomi

Dalam hal ini mengambil dari konsep ajaran islam didalam perekonomian islam dalam hal kesejahteraan berbeda dengan cara pandang ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memaknai kehidupan. karena dalam islam tidak ada prinsip yang eksploitatif serta konsumtif, akan tetapi penting menumbuhkan keseimbangan dengan spiritual. fasilitas materi yang berbagai macam yang dibutuhkan akan memberikan kepuasan dalam aspek kesejahteraan rill. Sementara, kebutuhan spiritual berhubungan dengan keimanan serta takwa kepada Allah SWT. serta aspek kasih sayang terhadap sesama baik dalam keluarga maupun skala yang lebih luas, sehingga memunculkan masalah dalam lingkungan dan jauh dari kejahatan.³⁵

Menurut Adi Fahrudin, tujuan kesejahteraan adalah sebagai berikut

1. Tercapainya kehidupan dengan sejahtera seperti terpenuhi segala sesuatu yang pokok.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya. dalam maksud ini untuk mencapai kesejahteraan secara luas dalam

³⁴ Dunn, I. William, *Analisis Kebijakan Publik*, PT: Hananidita Graha Widya (2003), 38

³⁵ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50.

masyarakat terlebih dahulu aspek yang mendasar perlu terpenuhi seperti papan, pangan, sandang, kesehatan serta keharmonisan sosial sehingga hal tersebut dapat mendorong terwujudnya pemberdayaan atas berbagai macam potensi-potensi yang tersedia

Dapat diartikan yang dimaksud kesejahteraan dalam masyarakat bila telah terpenuhi hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat yang merupakan faktor penunjang kehidupan seperti halnya kesehatan dan lain sebagainya. Menurut badan pusat statistik kelayakan ekonomi yang di tandai sebagai:

1. Keadaan tempat tinggal

Dapat menjadi penilaian adalah tempat tinggal disini dapat dikategorikan menjadi 5 bagian jenismulau status kepemilikan, wujud dari atap, luas, lantai maupun dinding. Dari 5 item tersebut bisa dijadikan 3 golongan, permanen contoh dari golongan yang *pertama*, permanen memiliki dinding yang terbuat dari tembok serta penggunaan bahan kayu berkualitas tinggi, penggunaan keramik atau ubin dengan kondisi yang baik, serta kondisi atap yang dapat berupa genteng atau bisa dengan seng, *kedua* semi permanen dimana kualitas dinding belum bisa dikatakan baik, atau penggunaan esbes atau seng pada atap, *ketiga* non permanen dimana dapat diamati bila kondisi rumah seperti dalam hal fisik yang nampak dinding yang sederhana dari bambu maupun papan, ubin semen serta atap dari tumbuhan, seng atau sejenisnya.

2. Perawatan Kesehatan

Dapat dinilai pula dari bagaimana cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item, terlihat dari kondisi rumah apakah menjangkau ke toko obat, penganganan obat-obatan, harga obat-obatan, rumah sakit terdekat dan alat kontrasepsi dengan mudah atau tidak. Dari 5 hal ini di golongan menjadi 3 golongan. *Pertama*, golongan mudah golongan ini berarti apabila golongan 5 di atas telah terpenuhi. *Kedua*, golongan cukup golongan ini di kategorikan sebagai golongan cukup apabila penjelasan di atas terpenuhi tetapi tidak lebih dari 2 item, 3 sisa dari indikator untuk terkait kemudahan dalam fasilitas kesehatan. *Ketiga* golongan sulit dimana

menjadikan golongan terendah dimana dari 5 hal banyak belum tercapai atau lebih dari 3 tidak terpenuhi.

3. Pendidikan

Indikator kesenjangan dalam pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, proses penerimaan, dan jarak ke sekolah, dari 3 item diatas menjadikan 3 golongan. *Pertama*, golongan mudah golongan ini tergolong mudah apabila semua 3 item diatas sudah terpenuhi semua. *Kedua*, golongan cukup tergolong golongan cukup apabila diantara 3 item diatas ada satu item yang tidak terpenuhi. *Ketiga*, *golongan sulit* golongan ini menjadikan golongan terbawah dan apabila diantara 3 item diatas hanya 1 item yang terpenuhi.³⁶

C. Peran

Dari pendapat menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran adalah hal dinamis bagi suatu status kedudukan, dengan individu menjalankan hak serta tanggung jawabnya maka sesuai dengan perannya. dalam organisasi setiap individu mempunyai karakter atau peran yang bermacam sesuai tugas serta tanggung jawab.³⁷ Peran bisa dimaknai sebagai keharusan yang terstruktur menyangkut tanggung jawab didalamnya memuat norma-norma. Peran memiliki kesinambungan tanggung jawab antara seorang pembimbing dengan pendukung dalam menjalankan fungsi. mempunyai keterkaitan dengan perilaku sesuai yang diharuskan. Syarat-syarat peran sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto didalamnya ada tiga hal yaitu:

1. Peran berkaitan dengan norma sesuai fungsi didalam masyarakat. Peran dapat diartikan serangkaian bermacam peraturan dengan maksud memberikan bimbingan serta pengarahan dalam berkehidupan bersama.

³⁶ Pita Prasetyaningtyas, Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olah Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan, *Universitas Brawijaya*, 4-5.

³⁷ Rosramadhana, *Menulis Etnografi : Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*, (Jakarta Pusat : Yayasan Kita Menulis, 2020), 87.

2. Peran dapat diartikan pula sebagai perilaku individu yang terlibat dalam lingkungan masyarakat.
3. Peran juga mencakup perilaku individu dalam bermasyarakat dalam hal ini struktur sosial.³⁸

Peranan (*role*) adalah suatu hal yang dinamis kedudukan (*status*). Jika seseorang mempunyai berbagai peranan dari lingkup kehidupannya maka seseorang tersebut dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dengan demikian dipahami bahwa peranan menjadi penentu apa saja yang diperbuat bagi masyarakat oleh masyarakat kedepannya.³⁹ Ada beberapa hal pengkategorian peran menurut Soekanto dikategorikan menjadi 3 sperti:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang dimiliki oleh seorang individu di dalam kelompok organisasi yang kemudian peran tersebut dibebankan kepada anggota sesuai kedudukan atau tanggung jawab pada kelompok dimana tugasnya berkaitan dengan aktifitas kelompok seperti kepengurusan dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang ditujukan dari anggota kelompok kepada anggota kelompok lainnya, sehingga keterlibatan seorang anggota kelompok dapat memberikan sumbangan ide-ide atau gagasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan berguna bagi anggota kelompok itu sendiri serta ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan dalam kelompok tersebut. Sehingga kegiatan mampu berjalan secara maksimal.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran dimana pergerakannya terbilang pasif, terlihat dimana perilaku menghindari atau

³⁸ Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, 2017, 2.

³⁹ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2002), 212.

menahan diri dari tanggung jawab kepada anggota kelompok sehingga muncul suasana kondusif.⁴⁰

Berdasar kaitan diatas dapat dipahami peranan dijadikan pembatas tanggung jawab anggota guna tercapai tujuan dengan proses yang terstruktur dan telah disepakati. Peran dalam sebuah kelompok organisasi menentukan hasil perubahan untuk masyarakat kedepannya sesuai yang diharapkan seluruh pihak yang terlibat.

D. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Dapat dipahami secara umum bank merupakan hal yang bersifat pada peran penyimpanan, dan identik dengan keuangan. Tetapi seiring adanya perkembangan penyimpanan tidak hanya terkait dengan keuangan saja tetapi dapat berupa wujud lain. salah satu yang bisa dikaitkan dengan istilah bank yaitu perkembangan adanya bank sampah.⁴¹

Istilah bank sampah berkaitan dengan pengelolaan dalam wujud sampah dimana terjadi aktifitas penyimpanan pula. dapat dikatakan bank karena aktifitas yang dilakukan ada kesamaan sistem dengan bank yang terkait dengan keuangan. berdasar pedoman yang diatur Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 terkait dilaksanakannya Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, dimana pengolahan dapat dilakukan serta memungkinkan penggunaan ulang serta memunculkan nilai guna ekonomi.⁴² Bambang Suwerda mempunyai penjelasan terkait bank sampah adimana terdapat transaksi dengan pelayanan perihal sampah yang dilakukan teller yang bertugas pada bank sampah.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2002), 212.

⁴¹ Bambang Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta : Pustaka Rihama, 2012), 58.

⁴² Kementrian Lingkungan Hidup” (On-line), tersedia di: <http://komara.weebly.com/peraturan-lingkungan/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-no-13-tahun-2012-tentang> (2012)

2. Tujuan Bank Sampah

Dari tujuan yang dipahamib bahwa agar masyarakat mampu melakukan manajerial terkait masalah samah sehingga bisa lebih ramah terhadap kehidupan serta mampu memberikan manfaat dalam segi ekonomi. maka dihubungkan pula dengan gerakan 3R di kalangan masyarakat, maka demikianmanfaat tidak sebatas eonomi tapi meluas bagi lingkungan yang tentu memberikan pengaruhpada kesehatan.⁴³

Dengan selarasnya prinsip 3R, amaka komponen yang terkait seperti masyarakat maupun lembaga terkait akan mencapai kebaikan bersama yaitu lingkungan yang mendukung. Berdasar yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa bank sampah merupakan tempat dalam upaya pengelolaan sampah dan memberikan dampak kemanfaatn ekonomi didalamnya. dimana dalam pengelolaan yang berjalan sesuai dengan prinsip bank yang umum dipahami. dengan perbedaan pada obyek yang berupa sampah yangharga jaulnya disesuaikan dengan nilai yang ada pada sampah yang disetorkan.

3. Strategi Pengelolaan Bank Sampah

Berdasarkan tuntunan yang diatur Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 terkait dengan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, penggunaan ulang sampah serta pengelolaan daur ulang pada kegiatan 3R adalah meminimalkan segala sesuatu yang memnimbulkan limbahpenggunaan kembali mana yang layak pakai serta pengelolaan berbentuk wujud produk yang baru.

- a. *Reduce* (Mengurangi Sampah) adalah upaya pengurangan volume timbunan sampah.⁴⁴ Merupakan mitigasi utama dalam pengurangan sampah di TPA. Menurut Suryono dan Budiman

⁴³ Profil Bank Sampah Indonesia, (Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2011), 8.

⁴⁴ Basriyanta, *Memanen Sampah*, Yogyakarta (2007), 20

(2010) Reduksi (mengurangi sampah) dterbagi berbagai proses sebagai berikut.

- 1) Reduksi volume sampah secara mekanik. Dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemadat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak.
 - 2) Reduksi volume sampah secara pembakaran. Pdilakukan bila ada fasilitas tempat atau ruang yang terbuka. Pdengan diberlakukannya pengurangan lewat pembakaran dengan instalasi incinerator sederhana. Dengan terlebih dahulu memilah mana yang mampu dilebur lewat pembakaran serta dan mana yang tidak serta plastik. Di karenakan plastik mempunyai kandungan zat yang mempunyai dampak buruk bagi kesehatan.
 - 3) Reduksi sampah secara kimiawi. disebut juga pyrolysis yaitudengan tanpa penggunaan oksigen melalui proses pada suatu reaktor. dimana zat organiktidak tahan panas maka efektif dilakukan pemanasan tanpa epenggunaan oksigen maka efektif dalam peleburan zat organik (kondensasi) dapat berbentuk seterusnya berupa pada, cair maupun gas.
- b. *Reuse* (mengunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sebagai upaya mengefektifkan mana yang layak dipergunakan berulang atau kembali (Suryono dan Budiman, 2010).⁴⁵ Contohnya limbah yang mempunyai nilai yang dapat memunculkan estetika sehingga mampu memberikan produk baru yang menarik, serta barang bekas yang dapat digunakan kembali.dengan kategori bukan sekali pakai, tentu barang yang dapat digunakan yang mampu bertahab cukup lama sehingga memperpanjang terjadinya proses terjadinya sampah,tetapi sampah plastik tiidak dianjurkan dalam penggunaan kembali karena

⁴⁵ Basriyanta, *Memanen Sampah*, Yogyakarta (2007), 20.

kandungan zat didalamnya yang dapat menimbulkan bahaya.⁴⁶

Sebelum penggunaan berlanjut dilakukan terlebih dahulu pembersihan maupun klasifikasi terhadap berbagai jenis sampah yang didapati, semisal mana yang plastik ataupun mana yang kertas dimana pengelolaannya melalui beberapa tahapan proses :

- 1) Memilih wadah, yang menunjang semisal kontong ataupun sejenisnya yang dapat dipergunakan ulang.
 - 2) Penggunaan kembali kemasan yang telah kosong sesuai dengan fungsi dasar pada sampah tersebut.
 - 3) Pengelompokan limbah sesuai dengan jenis yang ada.
 - 4) Pemberlakuan bersih-bersih sampah.
 - 5) Sampah yang telah dilakukan pemilahan maka dapat dipergunakan secara berkelanjutan sesuai dengan fungsi yang ada pada sampah tersebut.
- c. *Recycle* (Mendaur Ulang) yaitu pemrosesan yang dapat memberikan manfaat berupa penggunaan sebagai barang lain.⁴⁷ *Recycling* (mendaur ulang) adalah “penggunaan kembali dengan manfaat menjadi produk yang lain.”⁴⁸ proses ini berkaitan dengan penggunaan dengan pembaharuan berupa produk terkhusus pada barang yang tidak lama sifat kemanfaatannya.

Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2006) *recycling* diartikan “pemanfaatan kembali sampahsampah yang masih dapat diolah”. dengan bahan yang dapat dimanfaatkan kembali diantaranya:

- 1) Botol bekasberbagai jenis yang mampu dimanfaatkan ulang.
- 2) berbagai macam kertas tyang dapat didaur ulang.

⁴⁶ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Yogyakarta (2009), 20.

⁴⁷ Basriyanta, *Memanen Sampah*, Yogyakarta (2007), 20.

⁴⁸ Suryono, dan Budiman, *Sistem 3R*, Bandung : Institut Teknologi Bandung, (2010), 5.

- 3) berbagai material logam.
- 4) Serta berbagai macam plastik yang dapat diolah kembali secara efektif, dengan diolah terlebih dahulu lewat sterilisasi dan lain sebagainya.⁴⁹

E. Penelitian Terdahulu

1. “Peranan Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Bank Sampah di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar” oleh Padliani (90100116076) didalamnya terdapat penjelasan bahwa upaya dalam memberdayakan masyarakat mempunyai tujuan dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada guna menaikkan kelayakan bagi masyarakat. dapat dipahami pula pemberdayaan guna memunculkan kemandirian. Sehingga pengembangan yang didapat mampu menimbulkan kemajuan.

Hasil dari penelitian peran bank sampah bersinar yang ada di Desa Sabang Subik didapati hal yang baik selain memberi peningkatan pada taraf hidup masyarakat serta bermanfaat dalam memunculkan kesadaran terhadap lingkungan sehat, terutama pada wilayah pesisir muncul kenyamanan tersendiri. Di Daerah Kecamatan Balanipadimana kebiasaan sebelumnya dengan pembuangan sampah yang langsung kelaut, engan adanya program pemberdayaan bank sampah dapat mengurangi resiko pencemaran ekosistem laut serta dengan adan pendaur ulangan memici inofasi maupun kreatifitas pada masyarakat.⁵⁰

2. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Unagaran Barat, Kabupaten Semarang” oleh Aniq (1201415040) pemberdayaan bermakna proses sebagai akibat dari mana individu mempunyai pilihan untuk pengambilan tindakan serta

⁴⁹ Purwendro dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik*, Jakarta : Penebar Swadaya (2006),56.

⁵⁰ Pradiliani, “Peranan Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020).

dorogan maupun keterampilan dalam melakukan peran dalam suatu kelompok dengan didasari rasa kepemilikan. Sering dianggap pemberdayaan baat merupakan latar belakang pemberdayaan yang dilakukan diindonesia. Tetapi menurut pranaka pemberdayaan diindonesia lebih memiliki ciri khas dari pada barat. Lebih lanjut, yang dimaksud demikian adalah pemberdayaan “empowerment” yang berarti pemberian kekuasaan disertai pemberian “daya” atau kekuatan.tidak hanya pemberian kuasa pada kaum yang keterbatasan tapi semua elemen baik kelompok maupun individu.

Didapati hasil solusi pememberdayaan bank sampah merupakan langkah tepat selain berdampak kemajuan dalam ekonomi juga berdampak luas pada kelestarian suatu lingkungan.Oprasional dari bank sampah perlu membutuhkan program-program layanan. Dari program tersebut mampu diijadikan parameter tentang fakttor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan serta tahapan-tahapan yang memang diperlukan.⁵¹

3. “Implementasi Program Bank Sampah Malang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang di Kota Malang” oleh Fitra Kurniawati (115030101111013), Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) mdimana bersifat dinamis dengan secara berkesinambungan dengan sinergi dari semua pihak yang terlibat , serta evolutif terhadap semua potensi yang ada. Mengartikan pemberdayaan sebagai sesgala sesuatu yang mampu meningkatkan aspek ekonomi sesuai dengan nilai yang ada pada masyarakat.dengan melalui berbgai proses hingga sampai muncul kemandirian pada masyarakat. Hakekat dari pemberdayaan dengan mengembangkan budaya sesuai kapasitas berhubungan dengan pihak dari luar sebagai katalisator yang memberi kesempatan masyarakat untuk mendapat apa yang diinginkanyang pada dasarnya merupakan pendistribusian kekuasaan guna mencapai kemandirian. dengan maksud

⁵¹ Aniq, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Unagaran Barat, Kabupaten Semarang” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang (2019).

masayarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan secara efektif.

Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi terkait mekanisme kegiatan yang diselenggarakan BSM menjadi salah satu hal penting dalam mensukseskan program bank sampah. Pihak BSM sendiri terbuka dalam memberikan pembelajaran terkait sistem pengelolaan bagi siapa saja yang tertarik, semua aspek diinformasikan dari pengelolaan hingga, perputaran uang yang terdapat.⁵²

4. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Berkah Jaya V Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah” oleh Dilla Useva (1541020058). Dalam pemberdayaan mempunyai maksud agar menumbuhkan kemandirian individu dan masyarakat. dimana mencakup mandiri dalam berfikir maupun bertindak. yang lebih spesifik guna membentuk masyarakat kognitif dengan lebih baik. dimana dalam upaya memecahkan masalah dengan pemikiran yang didasari wawasan serta pengetahuan yang mumpuni.

Dengan hasil didapat dimana maksud dari program pemberdayaan sampah bertujuan agar mampu memanfaatkan potensi dari sampah serta memberikan manfaat bagi lingkungan. Dengan proses pemberdayaan diawali sosialisasi kepada masyarakat, Pembentukan tim, serta tata cara pengelolaan, pendirian bank sampah, pelayanan tabungan sampah, pendampingan maupun pembinaan tidak lupa kontrol dengan monitoring serta dilakukannya evaluasi (MONEV).⁵³

F. Kerangka Berfikir

Upaya memberdayakan Masyarakat melalui Bank Sampah untuk menunjang masyarakat yang lebih baik lagi

⁵² Fitra Kurniawati, “Program Bank Sampah Malang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang di Kota Malang”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2018)

⁵³ Dilla Useva, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Berkah Jaya V Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

serta sejahtera di Desa Kajar menjadikan solusi yang bagus untuk desa yang memiliki banyak penduduk. Apalagi sekarang perubahan banyak dipengaruhi oleh makin banyaknya penduduk di suatu tempat, cepat atau lambat bisa mengakibatkan suatu bencana, namun akibat dari banyaknya penduduk bisa dibuatkan suatu program untuk masyarakat yang prosesnya bisa berkembang sesuai dengan per individunya. Oleh sebab itu, bisa dibuatkan bank sampah di kawasan yang memiliki banyak penduduk, adanya bank sampah bisa mengurangi potensi dampak buruk yang memicu hal buruk terhadap sumber daya manusia yang semakin banyak, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan program bank sampah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dibuatkannya program bank sampah membuat masyarakat tahu akan pentingnya dampak dari sampah yang setiap hari semakin meningkat sesuai dengan populasi penduduknya, akan mengakibatkan bencana polusi udara dan banjir tanpa membuang sampah di tempatnya. Setelah masyarakat tahu bagaimana sampah itu bisa menjadikan nilai jual tinggi. Tidak hanya untuk mengubah sampah menjadi rupiah namun bisa mengubah desa menjadi lebih sehat, nyaman dan bersih. Dengan berjalannya waktu dengan adanya bank sampah masyarakat bisa lebih teliti untuk memanfaatkan dan memilah sampah apa saja yang bisa dimanfaatkan mejadikan nilai jual dan menjadikan nilai tambah untuk ekonomi di desa. Maka dari itu haarus adanya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih semangat untuk menjalankan program bank sampah tersebut. Dalam pengembangan bank sampah pasti adanya bebrapa hal yang berpengaruh baik menghambat aupun mendukungberbagai potensi setelah terwujudnya program bank sampah.

Faktor yang dijadikan pendukung dengan mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, menyambut baik akan bank sampah itu sendiri dan adanya dukungan dari pemerintah. Sementara faktor penghambat kurang sadarnya masyarakat, harga jual sampah tidak stabil, dan kurangnya pendanaan. Sehingga menjadi pengmabat namun bisa diperbaikiagar mendapat hal yang lebih baik. Hasil dari upaya program pemberdayaan masyarakat melalui peran bank

sampah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk bisa meningkatkan perekonomian desa dan terjaganya ekologi lingkungan desa Kajar.

